



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD ADIB SUSILO
2. Jabatan : AUDITOR UTAMA
3. NHK : 402530

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.080.502.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m²/48 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 315.288.000
2. Tanah Seluas 624 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 289.536.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 374 m²/533 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.052.930.000
4. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 432 m²/100 m² di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 282.748.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 266.300.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000
3. MOBIL, HONDA CITY HB Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. MOTOR, YAMAHA XSR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.300.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	634.693.544
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	5.047.795.544
III. HUTANG	Rp.	533.664.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.514.131.544

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.